

KERJA SAMA FINANSIAL OKI: ISU DAN PROSPEK KAWASAN MATA UANG BERSAMA

FINANCIAL COOPERATIO OF OIC COUNTRIES: PROSPECT FOR COMMON CURRENCY AREA

Umi Karomah Yaumidin

Pusat Penelitian Ekonomi (P2E-LIPI)

E-mail: umi_karomah@yahoo.com, yaumidinuk@gmail.com

Abstract

This paper attempts to observe the possibility of common currency area among OIC (Organization of Islamic Cooperation). This is the first step to build financial cooperation in OIC member countries. This paper will analyse with six Middle East countries that is Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia and United Arab Emirates. Data were collected from the World Bank database and IMF from 1975 – 2011. VAR (Vector Auto Regression) method was applied to analyse macroeconomic condition in those countries. The study found that the countries, which participate as a member of Gulf Cooperation Council (GCC) except Kuwait has great prospect to continue intensive cooperation on financial sector. Kuwait has not the same integration toward optimum currency area as others. In this regard, differences on macroeconomic policy particularly on decision to choose monetary regime contribute to not join in the Common Currency Area (OCA)

Keywords: *Organization of Islamic Cooperation, Middle East, Common Currency Area*

Abstrak

Organisasi Kerja sama Islam (OKI) telah melakukan kesepakatan kerja sama ekonomi dan perdagangan dalam kurun waktu yang cukup lama. Untuk tahapan selanjutnya OKI diharapkan dapat menuju pada proses integrasi ekonomi yang lebih tinggi seperti kerja sama di sektor finansial. Tulisan ini akan mengulas kemungkinan negara-negara anggota OKI bekerja sama membentuk kawasan mata uang bersama. Dengan menggunakan pendekatan metode VAR untuk menguji kemungkinan adanya kawasan mata uang bersama diantara negara-negara anggota OKI. Dimulai dengan Negara-negara yang berada di kawasan Timur Tengah seperti Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab, analisis datadari tahun 1975-2011 menunjukkan bahwa terdapat kemungkinan untuk membentuk kawasan mata uang bersama sebelum akhirnya dijadikan acuan bagi pembentukan kawasan mata uang bersama di lingkup anggota OKI. Hasil studi menunjukkan bahwa gejolak permintaan dan penawaran yang searah dengan gejolak struktural yang terjadi di lima negara (Iran, Iraq, Qatar, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab). Hal ini mengindikasikan adanya kesamaan sistem nilai tukar yang di patok pada mata uang tertentu yaitu Dollar Amerika, sehingga terbuka kesempatan untuk melakukan integrasi ekonomi pada tingkat yang lebih tinggi. Namun demikian, untuk kasus Kuwait yang berlawanan dengan lima negara lainnya dapat disebabkan oleh berbagai macam factor seperti perbedaan sistem moneter hingga pola pertumbuhan ekonomi dan kebijakan makro di negara setempat. Sehingga factor-faktor ini dapat pula menjadi factor penghambat terjadinya kawasan mata uang bersama di antara anggota OKI.

Kata Kunci: Organisasi Kerja sama Islam, Timur Tengah, Kawasan Mata Uang Bersama

PENDAHULUAN

Organisasi kerja sama Islam (selanjutnya disingkat OKI) adalah organisasi internasional yang memiliki cakupan area geografis terbesar kedua setelah PBB, dari paling utara Albania (Eropa) ke arah selatan Mozambik (Afrika) hingga bagian barat dunia Guyana (Latin Amerika) sampai bagian paling timur Indonesia (Asia), dan

hanya benua Australia saja yang belum termasuk didalamnya. Dengan keanggotaan yang mencapai 57 negara (56 minus Syria di masa konflik saat ini), total populasinya mencapai seperlima total populasi dunia, meskipun jumlah penduduk muslim dunia telah mencapai dua pertiga penduduk dunia, artinya secara perhitungan kasar masih sekitar 40 persen penduduk muslim dunia

yang belum berpartisipasi dan mendapatkan keuntungan dari keberadaan OKI.

Motivasi yang mendasari integrasi ekonomi dapat beragam, namun yang seringkali muncul diawal proses globalisasi yang ditandai dengan semakin liberalnya sektor perdagangan yang menggeser peran perekonomian autarky, adalah kepentingan atas region atau wilayah yang saling tergantung dan berdekatan secara geografis. Berbeda dengan integrasi ekonomi pada umumnya, OKI terbentuk atas dasar kesamaan faktor religi, meskipun dari struktur ekonomi, ideologi, system moneter dan finansial sangat bervariasi. Dari struktur ekonomi misalnya Negara-negara anggota OKI dikelompokkan kedalam tiga kelompok yaitu, kelompok Negara berpendapatan tinggi dan pengekspor minyak, kelompok Negara berkembang dan Negara sedang berkembang (lihat tabel 1).

Sementara itu, dalam ukuran ekonomi, share GDP OKI terhadap GDP dunia relatif kecil hanya 7,2 persen dibandingkan Amerika Serikat (24,6%), Jepang (8,7%), China (13.71%),

dan Uni Eropa (19.02) di tahun 2009. Lebih jauh lagi GDP OKI dibentuk oleh GDP sepuluh besar Negara anggota yang terkelompok dalam Negara berpendapatan menengah dan Negara pengekspor minyak seperti Turki, Indonesia, Saudi Arabia, Iran, United Emirat Arab, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan dan Algeria. Kondisi ini tentunya sangat mempengaruhi posisi OKI di dalam percaturan perdagangan maupun politik internasional. Meskipun demikian, masih selalu ada optimism bahwa OKI kedepannya akan membawa perubahan yang lebih baik bagi Negara-negara muslim dan berpenduduk mayoritas muslim karena OKI mampu menjaga rata-rata pertumbuhan ekonominya cukup tinggi (SESRIC, 2010). Di satu sisi hal ini mengindikasikan adanya perbaikan standar kehidupan diantara Negara-negara OKI, tetapi di sisi lain hal ini juga menunjukkan adanya absolut maupun kondisional konvergen. Dengan mengambil 31 sampel negara OKI yang masih berada dalam posisi Negara berkembang dan sedang berkembang kajian dari SESRIC (2013) menunjukkan bahwa terjadi kondisionalitas konvergen dalam artian bahwa

Tabel 1. Pengelompokan Negara Anggota Oki Berdasarkan Struktur Ekonominya

Negara Pengekspor Minyak	Negara Sedang Berkembang (LDC)	Negara Berkembang (MDC)
1. Algeria	1. Afghanistan	1. Albania
2. Azerbaijan	2. Bangladesh	2. Cameroon
3. Gabon	3. Benin	3. Cote d'Ivoire
4. Iran	4. Burkina faso	4. Mesir
5. Iraq	5. Chad	5. Indonesia
6. Kuwait	6. Gambia	6. Jordan
7. Oman	7. Guinea	7. Kazakhstan
8. Saudi Arabia	8. Guinea-bissan	8. Lebanon
9. Turkmenistan	9. Mali	9. Malaysia
10. Uni Emirat Arab	10. Mauritania	10. Morocco
11. Bahrain	11. Mozambique	11. Pakistan
12. Brunei	12. Niger	12. Syria
13. Lybia	13. Senegal	13. Tajikistan
14. Qatar	14. Sierra Leone	14. Tunisia
	15. Sudan	15. Turkey
	16. Togo	16. Uzbekistan
	17. Uganda	17. Maldives
	18. Yaman	
	19. Suriname	
	20. Guyana	
	21. Nigeria	
	22. Somalia	
	23. Comoros	
	24. Djibouti	
	25. Kyrgyz Republic	
	26. Palestina	

Sumber: Sescric, 2008

perekonomian regional OKI tumbuh dengan lebih cepat, namun menjauh dari nilai steady statenya sendiri dalam jangka panjang. Dibutuhkan waktu sekitar 55 tahun untuk mencapai separuh angka steady state yang diharapkan untuk regional OKI.

Terlepas dari meningkatnya regionalisasi perdagangan, beberapa ekonom justeru memiliki pendapat yang berbeda. Pandangan umum seringkali menyatakan bahwa keterbukaan perekonomian cenderung menghasilkan kesejahteraan yang lebih baik daripada perekonomian yang tertutup. Tetapi, Krugman (1991); Frankel, Stein and Wei, (1995) membuktikan baik secara empiris maupun teoritis bahwa pola perdagangan regional saat ini justeru mengurangi kesejahteraan negara tertentu dibandingkan pada saat kondisi sebelum terjalannya kerja sama regional. Hal ini dikarenakan kerja sama regional seringkali menciptakan '*trade diversion*' daripada '*trade creation*'. Menjatuhkan pilihan untuk kerja sama bilateral atautah unilateral sangat tergantung pada pengalaman sejarah masing-masing negara, belajar dari pengalaman krisis 1997–1998 maupun krisis 2008–2009, Negara-negara emerging market maupun berkembang sepakat bahwa kerja sama unilateral cenderung lebih baik daripada kerja sama bilateral dari sisi kemanfaatan ekonomi yang diperolehnya terutama untuk penjagaan saat terjadinya krisis (Huang dan Chang, 2012; Nicolas, 2012; Kawasaki, 2011).

Mengingat sebagian besar Negara anggota OKI masih berada pada tahap sedang berkembang dan berkembang dalam pembangunan ekonominya, permasalahan seperti ketimpangan struktur ekonomi yang termasuk didalamnya kemiskinan dan pengangguran akan menjadi agenda utama pembangunan baik di tingkat nasional maupun regional. Sementara bagi kelompok ekonomi yang sudah termasuk dalam kelompok emerging market maupun Negara perbendapatan menengah cenderung dihadapkan pada permasalahan simultan yang dikenal sebagai *Trilemma* di era pendalaman globalisasi (deepening globalization era). Kebebasan moneter, stabilitas nilai tukar dan integrasi finansial merupakan masalah yang akan dihadapi secara simultan bagi Negara-negara yang memilih jalur mobilitas modal yang lebih tinggi untuk mendapatkan stabilitas nilai tukarnya, yang pada intinya kebijakan ini diambil semata-mata

untuk menjaga derajat kebebasan (kalau belum bisa dikatakan kedaulatan) moneter (Aizenman dan Sengupta, 2012).

Namun demikian, menjadi bagian dari sebuah integrasi ekonomi baik yang bersifat kewilayahan yang dibatasi oleh batas-batas wilayah maupun yang bersifat kepentingan yang didasari oleh prinsip most favored nations, kerja sama finansial regional menjadi alasan penting seiring dengan meningkatnya ketidakpastian global yang memicu terjadinya krisis. Meskipun terminology kerja sama finansial terkesan sangat ambigu dan ambisius, tidak satupun orang meragukan bahwa kerja sama finansial dibutuhkan oleh setiap Negara yang terintegrasi dalam ekonomi global. Menurut Wang (2004) setidaknya terdapat tiga pilar utama dalam mewujudkan kerja sama moneter dan finansial yaitu assistensi, monitoring dan pengawasan, serta koordinasi nilai tukar. Berkaca pada pengalaman Uni Eropa, koordinasi nilai tukar akhirnya menjadi kata kunci dari semua komitmen kerja sama finansial, meskipun proses pengumpulan cadangan luar negeri dan kerja sama kredit seperti bilateral swaps merupakan agenda umum yang sering dilakukan oleh blok-blok ekonomi yang menjalin kerja sama moneter dan finansial. Tetapi perlu menjadi catatan bahwa tidak ada satupun system nilai tukar yang selalu diinginkan oleh semua Negara (Frankel, 1999). Rezim nilai tukar tidak akan dipilih sekali untuk sepanjang waktu, karena pilihan atas system nilai tukar selalu berhubungan dengan pertanyaan fundamental, system nilai tukar manakah yang paling tepat yang mampu melindungi sebuah perekonomian dari kejutan (shocks) dalam negeri maupun luar negeri (Edison and Melvin, 1990; Frankel, Schmukler and Serven, 2000; Kawai dan Akiyama, 1998; Kwack, 2004).

Dengan kuantitas Negara anggota yang banyak dan tingkat keberagaman struktur ekonomi yang tinggi, maka tulisan ini akan mengulas kemungkinan integrasi finansial diantara Negara-negara OKI sebagai tindak lanjut dari derajat integrasi ekonomi yang lebih tinggi setelah proses perdagangan bebas antar anggota terjal. Selanjutnya paper ini secara khusus membahas rezim nilai tukar di Negara-negara pengekspor minyak yang memiliki kekuatan secara ekonomi maupun politik dalam kerangka

kerja gerakan OKI. Hal ini penting untuk melihat kemungkinan adanya integrasi disektor moneter dan fiskal diantara Negara-negara tersebut sebagai landasan fundamental bagi peningkatan kerja sama finansial diseluruh Negara anggota OKI. Struktur penulisan paper dimulai dari latar belakang pentingnya kerja sama finansial bagi Negara-negara anggota OKI. Bagian kedua memaparkan berbagai kajian pustaka mengenai integrasi ekonomi maupun finansial, regim nilai tukar yang berlaku di Negara-negara OKI dari berbagai penelitian sebelumnya. Tahapan selanjutnya adalah methodologi yang mengulas tentang data dan spesifikasi model yang digunakan dalam tulisan ini dan selanjutnya adalah bagian hasil dan pembahasan yang mengulas hasil perhitungan dan analisis model ekonometrik serta implikasinya bagi prospek kerja sama finansial di wilayah OKI. Paper ini ditutup dengan kesimpulan atas ulasan-ulasan sebelumnya serta memberikan gambaran bagi penelitian selanjutnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Integrasi Finansial

Secara teoritis, keuntungan yang diperoleh Negara emerging market dengan semakin terintegrasinya sektor finansialnya kedalam pasar finansial internasional diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan potensial dan meringankan beban penyesuaian akibat dari gejolak eksternal (Park, 2005). Dalam sebuah perekonomian terbuka, maka system keuangannya akan memberikan keleluasaan bagi warga negaranya untuk mendiversifikasikan asset-aset mereka ke saham-saham institusi keuangan asing yang digunakan untuk membiayai proyek-proyek dalam negeri. Lebih jauh Park (2005) menyatakan ketika sektor finansial terintegrasi dengan pasar modal internasional, maka negara-negara emrging market dapat melepaskan diri dari defisit eksternal maupun pengangguran yang direfleksikan dari ketidakseimbangan internal posisi finansial mereka.

Terdapat beberapa keuntungan potensial dalam integrasi pasar finansial seperti yang dikemukakan oleh Prasad, Rogoff, Wei, dan Kose (2003), integrasi pasar finansial akan mendorong spesialisasi dalam produksi, memperbaiki tingkat

efisiensi di industry keuangan, mengarahkan kebijakan ekonomi yang lebih baik, dan memiliki dampak terhadap sinyal komitmen kepada liberalisasi itu sendiri.¹ Meskipun banyak literature yang secara empiris membuktikan bahwa tidak semua Negara yang terintegrasi sektor finansialnya mendapatkan semua keuntungan tersebut, namun perlu diakui bahwa secara umum hal ini meningkatkan tingkat keuntungan, Asia Timur khususnya China, Jepang dan Korea misalnya telah menjadi net eksportir modal terutama pasca krisis Asia 1997. Bahkan, Prasad (2003) menunjukkan bahwa integrasi finansial bukanlah syarat cukup ataupun syarat perlu untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi kecuali jika modal yang diterima sanggup membangun kapasitas kelembagaan untuk memperoleh efisiensi alokatif dari modal asing yang ditanamkan di dalam negeri.

Oleh karena itu, pilihan untuk melakukan integrasi finansial khususnya untuk integrasi moneter dan konsolidasi fiskal, merupakan pilihan tertinggi dalam konsensus tahapan liberalisasi ekonomi khususnya bagi Negara-negara emerging market. Hal ini sesuai dengan tahapan integrasi ekonomi dari Balassa yang membagi integrasi ekonomi ke dalam lima tahap; 1) kawasan bebas perdagangan (Free Trade Area/FTA) merupakan kesepakatan bersama negara-negara yang berserikat untuk mengurangi semua tariff dan hambatan kuantitatif; 2) Custom union merupakan perluasan FTA dimana masing-masing negara partisipan mulai mengenakan tariff eksternal yang sama dengan negara pihak ketiga; 3) Pasar Bersama (Common Market) adalah bagian dari customs union, dimana terdapat kebebasan mobilitas bagi faktor-faktor produksi untuk serta memperkenalkan regulasi yang sama atas pergerakan faktor-faktor tersebut diantara negara anggota; 4) Economic Union adalah perluasan dari pasar bebas yang dilengkapi dengan harmonisasi fiskal, moneter, industry, transportasi regional dan kebijakan ekonomi lainnya; 5) Total economic Integration adalah satu kebijakan ekonomi dan pemerintahan supranational yang memiliki kekuasaan ekonomi yang besar, tidak ada hambatan administrative terhadap pergerakan

¹ Aspek pasar finansial merupakan kondisi pasar finansial yang terintegrasi didalamnya termasuk pasar saham, pertumbuhan kredit dari perbankan, dan pasar uang.

barang, jasa dan faktor-faktor produksi, sehingga harga barang sama dengan biaya transportasi bersihnya (lihat Javanovic (2006), Lukman dkk (2012)).

Dalam implementasinya tahapan integrasi finansial tidak selalu mengikuti pakem yang ditawarkan oleh Balassa. Hal ini sangat tergantung kepada kesepakatan antara Negara partisipan. Sebagai pengecualian adalah integrasi ekonomi yang terjadi pada masyarakat uni Eropa yang pada tataran implementasinya mengikuti tahapan-tahapan seperti di atas secara linier dan konsisten (Jovanovic, 2006).

System Nilai Tukar dan Rezim Moneter

Nilai tukar didefinisikan sebagai harga satu mata uang terhadap mata uang lainnya. Sedangkan rezim nilai tukar mengacu pada system yang mana harga mata uangnya diukur dan ini termasuk salah satu kebijakan penting pemerintah. Pilihan terhadap system nilai tukar akan berdampak pada perdagangan barang dan jasa, aliran modal, inflasi dan neraca pembayaran serta indikator makro ekonomi lainnya. Untuk alasan tersebut, maka pilihan atas rezim nilai tukar yang tepat adalah komponen penting dalam pengelolaan system keuangan Negara terkait dengan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas perekonomian. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa tidak ada satu konsensus yang mampu menunjukkan bagaimana memilih nilai tukar yang paling tepat dan tidak ada satupun rezim nilai tukar yang ideal untuk sebuah perekonomian. Karakteristik khusus sebuah Negara, preferensi pengambil kebijakan, kredibilitas institusi dan pengambil kebijakan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan penentuan rezim nilai tukar.

Hasil laporan dari IMF tahun 2008 seperti yang disadur dari OIC outlook Series (2012, hal. 6-7), memaparkan klasifikasi pengaturan nilai tukar dan kerangka kebijakan moneter, tidak ada Negara anggota OKI yang memiliki pertukaran arrangement dengan tender legal yang terpisah, yang mana hanya ada satu mata uang yang bersirkulasi sebagai tender legal yaitu dolar. Lebih lanjut, hasil ini mengindikasikan tidak ada satupun negara anggota lebih memilih untuk menyerahkan kebebasan pengawasan kebijakan

moneter dalam negerinya kepada negara lain (lihat table 3.1). Sebagian besar system nilai tukar yang diadopsi oleh Negara-negara OKI khususnya yang berada di kawasan Timur Tengah adalah system nilai tukar tetap yang dipatok pada mata uang dollar, Euro ataupun komposit mata uang utama dunia. Tetapi, Brunei Darussalam dan Djibouti lebih memilih bentuk *currency board system* sejak kemerdekaannya. Dengan mengadopsi system ini, maka Negara ini memiliki cakupan yang lebih kecil terhadap diskresi kebijakan moneter dengan menghapuskan fungsi tradisional bank sentral termasuk bank sentral sebagai penyedia dana terakhir. Selain kedua Negara tersebut, terdapat 11 negara di dunia yang memiliki kebijakan nilai tukar sejenis.

Dalam rezim *crawling peg*, mata uang disesuaikan secara periodik pada tingkat suku bunga tetap sebagai respon terhadap perubahan selektif indikator kuantitatif. Tingkat pergerakan dapat diatur untuk menghasilkan perubahan penyesuaian inflasi dalam nilai tukar, atau ditetapkan pada tingkat bunga yang diumumkan dan atau di bawah proyeksi perbedaan inflasi. Mempertahankan rezim *crawling peg* membebani perlakuan yang menghambat kebijakan moneter sebagaimana sistem nilai tukar tetap. Iran menyesuaikan nilai tukarnya berdasarkan indeks komposit nilai tukar didalam keranjang nilai tukarnya, sedangkan Iraq dan Uzbekistan menyesuaikan nilai tukarnya terhadap mata uang dollar Amerika. Hampir mirip dengan rezim *crawling peg*, rezim nilai tukar *crawling band*, menetapkan margin atas dan bawah yang disesuaikan secara berkala terhadap nilai tukar tetap sebagai respon terhadap perubahan selektif indikator kuantitatif. Derajat fleksibilitas nilai tukar dan kebebasan kebijakan adalah fungsi dari ambang batas. Komitmen untuk memelihara nilai tukar tetap berada di ambang batas membebani keleluasan kebijakan moneter. Azerbaijan merupakan satu-satunya negara OKI yang menerapkan sistem nilai tukar merangkak dalam ambang batas horisontal.

Dalam rezim nilai tukar mengambang, otoritas moneter mencoba mempengaruhi tingkat nilai tukar tanpa memiliki jalur atau target khusus. Indikator yang digunakan oleh otoritas moneter dalam mengelola tingkat nilai tukar adalah posisi

neraca pembayaran dan cadangan internasional, dan tidak perlu mekanisme penyesuaian otomatis. 14 negara anggota OKI mengadopsi rezim nilai

tukar tersebut, meskipun kerangka kebijakan yang digunakan berbeda-beda oleh masing-masing

Sementara itu, negara-negara di kawasan Asia cenderung menganut sistem nilai tukar yang

Tabel 2. Sistem Nilai Tukar dan kerangka Kebijakan Moneter Negara Anggota OKI

Exchange rate arrangement (no. of countries)	Kerangka kebijakan Moneter						
	Exchange rate anchor				Target agregat Moneter	Kerangka target inflasi	lainnya
	USD	Euro	Komposit	lainnya			
Exchange arrangement with no separate legal tender (0)							
Currency board (2)	Djibouti			Brunei			
Other conventional fixed peg arrangement (33)	Bahrain Bangladesh Guyana Jordan Kazakhstan Lebanon Maldives Oman Qatar Saudi Arabia Sierra Leone Suriname Tajikistan Turkmenistan United Arab Emirates Yemen	Benin ² Burkina Faso ² Cameroon ³ Chad ³ Comoros Côte d'Ivoire ² Gabon ³ Guinea-Bissau ² Mali ² Niger ² Senegal ² Togo ²	Kuwait Libya Morocco Tunisia		Sierra Leone		
Pegged exchange rate within horizontal bands (1)			Syria				
Crawling peg (3)	Iraq Uzbekistan		Iran				
Crawling band (1)			Azerbaijan				
Managed floating tanpa jalur tingkat nilai tukar tertentu	Kyrgyz Rep. Mauritania		Algeria		Afghanistan Gambia Guinea Mozambique Nigeria Sudan Uganda	Indonesia Egypt Malaysia Pakistan	
Mengambang bebas (3)					Albania Turkey	Somalia ⁴	

Catatan:

1/ Includes countries that have no explicitly stated nominal anchor, but rather monitor various indicators in conducting monetary policy.

2/ The member participates in the West African Economic and Monetary Union.

3/ The member participates in the Central African Economic and Monetary Community.

4/ As of end-December 1989.

cenderung fleksible, meskipun tidak dapat dibilang system nilai tukar mengambang murni.²Kawasaki (2012) mencatat bahwa perubahan ini dilandasi dari pengalaman krisis Asia di tahun 1997-1998, sebuah kenyataan yang lebih penting adalah bahwa aliran masuk modalasing sebagai valuta, pinjaman jangka pendek dari negara-negara asing, yang berubah menjadi valuta, dan utang jangka panjang lokal di pasar lokal. Ketidakseimbangan antara kewajiban dan aset dalam neraca di bank lokal atau yang biasa disebut “ketidakcocokan ganda” dari mata uang dan ketidakcocokan jatuh tempo.Ketidacocokan Ini adalah risiko yang berpotensi sistemik, dan karena itu, ketika modal yang sangat besar ini tiba-tiba menguap (terbang) sistem keuangan dan sistem nilai tukar dalam ekonomi negara berkembang runtuh tiba-tiba. Indonesia mengadopsi kebijakan nilai tukar dikelola mengambang dan sebelum Juli 2005, Malaysia mengadopsi kebijakan nilai tukar tetap dan setelah juli 2005 Malaysia beralih pada sistem nilai tukar yang dikelola mengambang, dan tampaknya nilai tukar Malaysia dipatok terhadap dolar AS setelah reformasi kebijakan nilai tukar mereka. Kelemahan studi yang dilakukan oleh SESRIC (2012) adalah hanya memaparkan rezim nilai tukar yang dianut oleh Negara-negara anggota OKI tanpa melakukan analisa kinerja rezim tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi maupun integrasi ekonomi yang diikuti oleh Negara-negara tersebut.

Dalam upaya untuk menjelaskan perilaku ini, Alesina dan Wagner (2006) yang menjelaskan

² Secara teoritis, tidak ada ruang untuk krisis mata uang bagi negara yang mengadopsi sistem nilai tukar mengambang bebas.Namun, memang benar bahwa terdapat kekhawatiran akan “takut mengambang “ di antara otoritas moneter di negara-negara yang terkena krisis dan negara-negara tetangga mereka. Untuk negara-negara berkembang, mengadopsi sistem nilai tukar mengambang bebas mungkin tidak disukai karena 1) tingginya volatilitas nilai tukardalam jangka pendek, berkorelasi dengan risiko ketidakpastian yang menyebabkan menurunnya transaksi perdagangan dan efisiensi, 2) tingkat misalignment nilai tukar di jangka menengah menurunkan persaingan harga di pasar internasional, dan 3) kecenderungan inflasi yang tinggi menghambat perkembangan pasar modal dan tingkat kesehatan dari suku bunga. Dalam buku teks standar ekonomi, solusi sederhana untuk mencegah mata uang dari kemungkinan krisis moneter atau aliran modal yang tiba-tiba adalah mengadopsi sistem mengambang bebas dengan liberalisasi pasar keuangan sempurna atau mengadopsi sistim nilai tukar tetap dengan peraturan kurs, transaksi modal, dan neraca modal yang ketat.

terjadinya perbedaan antara rezim nilai tukar yang diumumkan dengan yang diimplementasikan. Institusi yang buruk, ketidakstabilan ekonomi yang diakibatkan oleh ketidakstabilan moneter dan nilai tukar, merupakan faktor penyebab negara-negara cenderung memiliki ketakutan pada “ fear floating”. Sedangkan negara-negara dengan kelembagaan dan pengelolaan ekonomi yang lebih baik cenderung lebih memilih rezim nilai tukar mengambang meskipun mencoba membatasinya untuk tidak mengambang bebas.

Kriteria Umum Kawasan Mata Uang Bersama

Sebelum memasuki tahapan kawasan mata uang bersama (common currency area), setiap Negara yang berkomitmen untuk berserikat haruslah melalui tahapan proses integrasi finansial (Park, 2005). Beragam literatur menyebutkan bahwa indikasi sebuah kawasan yang secara ekonomi berpotensi menjadi kawasan mata uang bersama adalah kemiripan dalam karakteristik struktural ekonominya, melaksanakan strategy pembangunan yang hampir sama, dan menunjukkan sinkronisasi siklus bisnis (Eichengree dan Park, 2004). Dalam jangka panjang faktor-faktor tersebut merupakan subjek dari kejutan asimetris, faktor mobilitas mata uang, keterbukaan kestabilan fiskal dan lainnya yang terkait dengan variabel moneter dan fiskal (Park, 2005; Ricci, 2008).

Kerangka teori kawasan mata uang bersama didasari pada pemikiran Mundell (1961) dan McKinnon (1963) yang menyatakan bahwa nilai tukar kemungkinan akan menurun sejalan dengan semakin tingginya derajat keterbukaan ekonomi yang mempengaruhi perubahan harga dan upah yang secara langsung akan merubah netralisasi dari nilai mata uang. Selain itu, semakin terbukanya sebuah kawasan ekonomi akan memungkinkan bagi kejutan eksternal yang menyebabkan beragam masalah dalam proses penyesuaian baik untuk neraca perdagangan maupun neraca pembayaran. Mc Kinnon (1961) berargumentasi bahwa semakin terbukanya sebuah perekonomian yang ditandai oleh ratio perdagangan terhadap total barang-barang domestik cukup tinggi, maka rezim nilai tukar flexible tidak efektif, karena perubahan nilai tukar akan mengganggu kestabilan tingkat harga internal

(inflasi) dan memiliki dampak positif yang sedikit atas upah riil atau *terms of trade*. Namun, baik Mc Kinnon maupun Mundell (1963) akhirnya juga tidak begitu yakin apakah menetapkan nilai tukar yang sama untuk semua anggota di sebuah kawasan melalui kawasan mata uang bersama lebih baik daripada nilai tukar fleksible. Hal ini dikarenakan kawasan mata uang menyebabkan biaya gangguan asimetris, dan kekakuan harga yang cukup tinggi yang harus ditanggung oleh masing-masing Negara anggota.

Memperkuat pendapat Mundell dan Mc. Kinnon, Kennen (1969), Tavlas (1993) dan Mongeli (2002), sependapat bahwa ada beberapa kriteria standar yang harus dipenuhi untuk sebuah kawasan optimum currency (OCA). Mobilitas faktor dan keterbukaan terhadap perdagangan internasional merupakan kriteria awal untuk sebuah kawasan mata uang, selain faktor ekonomi yang termasuk didalamnya siklus bisnis, keterkaitan perdagangan, dan integrasi fiskal. Sedangkan faktor non ekonomi seperti aspek politik, sejarah dan bahasa juga mempengaruhi tingkat keberhasilan kawasan mata uang bersama.

Ramayandi (2005) mencatat setidaknya standar umum untuk pemenuhan kriteria ekonomi sebuah kawasan mata uang bersama dapat dilihat dari:

1. Integrasi perdagangan, untuk menggambarkan pola perdagangan regional dapat dilihat dari perdagangan intra regional, meskipun hanya mengandalkan hubungan ini akan menyebabkan misleading untuk gambaran umum pola perdagangan regional, karena banyak Negara yang bergabung dengan blok-blok perdagangan internasional bukan untuk semata tujuan perdagangan itu sendiri (Anderson dan Norheim, 1993). Kemungkinan yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini adalah dengan menghitung indeks intensitas perdagangan. Indeks ini mengukur sejauhmana intensitas perdagangan antar Negara terjadi dalam satu blok perdagangan. Dengan indeks ini dapat dijelaskan apakah intensitas perdagangan terjadi karena faktor komposisi komoditas atautkah faktor lainnya seperti faktor non ekonomi.
2. Kesamaan Gejolak Struktural, yang terli-

hat dari gejolak penawaran dan permintaan agregat. Gejolak permintaan agregat esensinya adalah mencakup komponen gejolak kebijakan makro dan gejolak pilihan publik yang dipengaruhi oleh perilaku permintaan masyarakat. Sedangkan gejolak penawaran agregat lebih mengacu pada perbedaan pola pertumbuhan ekonominya, yang merefleksikan situasi ekonomi saat ini sama atau berbeda dengan situasi ekonomi sebelumnya. Sebagai contoh meningkatnya over investasi akibat dari kelebihan aliran modal yang berimplikasi pada tingginya pertumbuhan ekonomi kawasan, yang mempengaruhi perubahan pola pertumbuhan ekonomi di masing-masing Negara di sebuah kawasan.

3. Konvergenitas Ekonomi, dalam proses integrasi ekonomi konvergenitas menjadi satu hambatan. Kecepatan pertumbuhan ekonomi di Negara-negara miskin tidak lebih cepat dari Negara-negara kaya, sehingga sebuah wilayah tidak layak untuk menjadi kawasan bersama mata uang jika masing-masing Negara anggota menunjukkan gejala konvergenitas yang lambat, meskipun ini tidak menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Negara itu sendiri konvergen. Tetapi setidaknya secara logika negara-negara yang berserikat dalam satu wilayah yang sama cenderung memiliki kesamaan struktur ekonomi, memiliki perbedaan yang relative kecil dalam menjalankan strategy pengelolaan permintaan.

METODOLOGI

Data

Studi ini akan menyoroti kemungkinan kawasan mata uang bersama untuk Negara-negara petrodollar sebagai langkah awal untuk memulai kerja sama finansial diantara Negara anggota OKI. Terdapat 6 negara petrodollar di kawasan timur tengah yaitu Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab.

Data diperoleh dari World Bank (World Development Indicators) database dan IMF untuk periode pengambilan sampel mulai

tahun 1975–2011. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data GDP riil, GDP deflator, dan data nilai tukar.

Metode Analisis

Mengikuti standar umum yang harus dipenuhi oleh kawasan mata uang bersama yang digunakan Ramayandi (2005), maka penelitian ini akan menghitung tentang intensitas perdagangan diantara Negara anggota OKI. Hasil perhitungan ini sudah banyak ditemukan di literatur dan menghasilkan temuan yang sama (lihat SESRIC, 2013; Hakim, 2012; Abdmoulah, 2011; Duasa, 2010; Hasan, 1998). Sehingga perhitungan ini diabaikan dan mengacu pada hasil perhitungan penelitian sebelumnya.

Indikator kedua adalah kesamaan dalam gejala structural, sehingga dalam studi ini akan melihat kesamaan gejala penawaran dan permintaan Negara-negara petrodollar sebagai proses awal integrasi finansial di kawasan OKI. Model yang digunakan mengiktui model dari Bayoumi dan Eichengreen (1994) yang digunakan juga oleh Ramayandi (2005), model ini menggunakan metode VAR (Vector Auto Regresion) yang pertama kali diperkenalkan oleh Blanchard dan Quah (1989). Dengan menggunakan output correlation antar Negara petrodollar yang mengindikasikan bahwa diantara Negara-negara petrodollar -yang memiliki letak kesamaan wilayah di Timur Tengah dan memiliki system nilai tukar yang di patok pada mata uang tertentu yaitu dollar- memiliki hubungan dan kesempatan untuk melakukan integrasi ekonomi.

$$X_t = A_0\varepsilon_t + A_0\varepsilon_{t-1} + A_0\varepsilon_{t-2} + A_0\varepsilon_{t-3} \dots$$

$$= \sum_{i=0}^{\infty} L^i A_i \varepsilon_t$$

$$\begin{bmatrix} \Delta y_t \\ \Delta p_t \end{bmatrix} = \sum_{i=0}^{\infty} L^i \begin{bmatrix} a_{11i} & a_{12i} \\ a_{21i} & a_{22i} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_{dt} \\ \varepsilon_{st} \end{bmatrix}$$

$$X_t = C(L)\varepsilon_t$$

Atau

$$X_t = C(L)\mu_t$$

Dimana, Δy_t adalah first difference dari ukuran log riil gross domestic product (GDP) yang mengukur pertumbuhan ekonomi, dan Δp_t adalah first difference dari log GDP deflator yang mengukur inflasi. $c_{ij}(L)$; $i=(y,p)$ and $j=(1=demand\ shock, 2=supply\ shock)$. ε_{dt} adalah gejala permintaan pada waktu t dan ε_{st} adalah gejala penawaran pada waktu t. Karena ε_{dt} dan ε_{st} tidak terobservasi, maka estimasinya menggunakan model VAR standar (unrestricted):

$$X_t = A(L)X_{t-1} \dots + \varepsilon_t \dots \dots \dots (1)$$

$$X_t = A(L)X_{t-1} + \varepsilon_t \dots \dots \dots (2)$$

Dalam proses penentuan model VAR harus memenuhi berbagai persyaratan seperti uji stationaritas, uji kausalitas, uji kointegrasi dan uji penentuan optimum lag. Selain itu untuk melihat gejala demand dan supply digunakan analisis Impuls Response Function. Semua uji ini akan dilakukan dengan menggunakan piranti lunak STATA 12.

Metode analisis VAR sebenarnya bukan satu-satunya cara untuk melihat factor gangguan terhadap variable endogen, terdapat beragam model seperti large scale stochastic simulations multicountries macroeconomic model (Bryant, 1993) atau Baxter dan Stockman (1989) yang mengidentifikasi faktor gangguan dari harga dan output dari pergerakan variable yang sama. Hakim (2012) juga melihat melalui pendekatan yang sama yaitu model VAR dengan pendekatan model G-PPP (Generalized Purchasing Power Parity). Kelebihan model VAR dibandingkan model simultan lainnya adalah (1) memiliki metode yang sederhana, karena tidak perlu menjustifikasi variabel yang menjadi variabel endogen atau variabel eksogenya. (2) estimasi yang sederhana karena metode OLS dapat diaplikasikan dalam persamaan. (3) Peramalan dengan menggunakan model VAR dibebepa kasus lebih baik dibandingkan dengan persamaan simultan yang lebih kompleks (Gujarati, 2003). Namun demikian model ini juga memiliki kelemahan yaitu (1) metode VAR bersifat sangat teoritik karena sedikit informasi yang tersedia. (2) Karena berfokus pada peramalan, sehingga

metode VAR kurang cocok untuk menganalisis suatu kebijakan. (3) Tantangan terbesar dalam metode VAR adalah menentukan panjang lag yang optimal. Proses estimasi untuk ukuran sampel yang besar akan mengurangi derajat bebasnya. (4) Dalam kenyataannya data dalam level sering tidak stasioner, sehingga memiliki kesulitan dalam mentransformasi data. (5) Koefisien yang diestimasi dalam VAR terkadang sulit untuk diinterpretasikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Integrasi Perdagangan

Ten-Year Program of Action yang diluncurkan di tahun 2005, merupakan tonggak awal semakin meningkatnya kerja sama ekonomi diantara Negara-negara anggota OKI. Hal ini juga mengindikasikan adanya strategi kunci bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui perdagangan yang lebih intensif diantara Negara anggota OKI. Dorongan untuk meningkatkan kerja sama perdagangan internasional diantara Negara anggota juga didukung dengan skema PRETAS (Protocol on Preferential Tariff Scheme yang ditandatangani sejak tahun 2007, dan mulai efektif berjalan di tahun 2010.

Dalam catatan sejarah integrasi ekonomi, Negara-negara anggota OKI telah terlibat dalam skema kerja sama baik yang bersifat regional maupun internasional khususnya di kawasan Arab sudah berlangsung lama. Hasan (1998) mencatat setidaknya terdapat 8 bentuk kerja sama ekonomi regional yang diikuti oleh hanya Negara-negara anggota OKI yaitu; 1) Council of Arab Economic Unity (CAEU), 1975 dengan anggota Mesir, Iraq, Lybia, Jordan, Kuwait, Mauritania, Somalia, Sudan, Syria, UAE, Yaman; 2) Arab Common Market, 1964 dengan anggota Mesir, Iraq, Libya, Jordan, Mauritania, Syria; 3) Gulf Cooperation Council (GCC), 1981 dengan anggota Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE; 4) Economic Cooperation Organization (ECO), 1985 dengan anggota Iran, Pakistan, Turki, Azerbaijan; 5) Arab Maghreb Union (AMU) 1987, dengan anggota Algeria, Libya, Mauritania, Maroko dan Tunisia; 6) Preferential Trade Agreement for North Africa (PTANA), 1987 dengan anggota Algeria, Mesir, Libya, Maroko dan Tunisia; 7)

Arab Cooperation Council (ACC), 1989 dengan anggota Mesir, Iraq, Jordan dan Yaman; 8) D-8, 1997 dengan anggota Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.

Pada tataran empiris, fenomena politik cenderung mendominasi dalam implementasi kerja sama baik ekonomi maupun non ekonomi diantara Negara anggota OKI. Kelompok D-8 yang bertujuan untuk memperkuat hubungan ekonomi dan integrasi ekonomi yang lebih besar dalam kerangka OKI. Namun demikian, peran D-8 dalam pengambilan keputusan di OKI relatif kecil dibandingkan kelompok petro-dollar³. Dengan beragamnya kerja sama ekonomi yang dibentuk di kalangan anggota OKI menunjukkan bahwa posisi ekonomi OKI secara universal belum mampu memberikan dampak yang menyeluruh terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya, meskipun banyak factor yang mempengaruhi kecenderungan sebuah Negara berserikat dengan Negara lainnya. Argumentasi yang lebih relevan adalah membangun jembatan terhadap kesenjangan yang begitu lebar baik dari sisi ukuran ekonomi, kebijakan ekonomi dan ideology ekonomi yang dianut diantara Negara anggota menjadi masalah serius untuk mewujudkan integrasi ekonomi yang menyeluruh di seluruh kawasan OKI.

Untuk ukuran yang paling rendah seperti integrasi sektor perdagangan, perdagangan intra-OKI sangat minim meskipun diantara kelompok kerja sama ekonomi seperti perdagangan intra-GCC, intra-D-8, intra-AMU masih relatif rendah, apalagi di tingkat OKI secara keseluruhan yang mengabungkan seluruh anggota yang berjumlah 57 negara (lihat Hasan, 1998; Hakim, 2012; Khan, 2009; Sesric, 2008). Seluruh hasil penelitian merekomendasikan bahwa Negara-negara OKI seharusnya lebih aktif dalam WTO, APEC, ASEAN, EU, dan NAFTA untuk memaksimalkan keterkaitan perdagangan intra-OKI melalui transfer teknologi, peningkatan skala ekonomi, dan peningkatan pasar domestic dan pasar regional.

³ Hasil pembahasan dengan Direktur Sosial Budaya dan Organisasi, Kementerian Luar Negeri Indonesia Bapak Arko Hananto, di Seminar Riset Desain P2E-LIPI, tertanggal 13-14 Maret 2013, di Gedung Widya Graha LIPI Jakarta.

Ekonomi Konvergen

Kelompok petro-dollar meskipun tidak selamanya harmonis dalam melaksanakan beragam kesepakatan kerja sama ekonomi regional, tetapi setidaknya langkah-langkah yang diambil untuk menuju derajat integrasi ekonomi yang lebih tinggi sudah dilakukan sejak lama. Kelompok teluk yang tergabung dalam GCC misalnya telah mencoba untuk mewujudkan monetary union⁴. Hal ini didasari pada kepentingan untuk mendapatkan keuntungan dari rezim nilai tukar yang sama. Khan (2009) mencatat bahwa group GCC (Bahrain, Arab Saudi, Oman, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab) memiliki tingkat konvergensi yang cukup tinggi yang diindikasikan dari variable-variable yang tersaji di table 3.2.

Pertimbangan yang digunakan cukup sederhana tanpa memperhitungkan range waktu yang digunakan sebagai patokan. Seperti yang

dikemukakan sebelumnya di tinjauan pustaka, setiap Negara cenderung untuk tidak 'setia' hanya pada satu rezim nilai tukar. Kelemahan penelitian ini adalah hanya melihat kelompok Negara teluk yang memiliki stabilitas yang cukup dalam menjaga hubungan kerja samanya, dan hanya berfokus pada rezim nilai tukar yang dianut saat ini yaitu system nilai tukar tetap yang dipatok pada USD atau indek komposit mata uang utama dunia. Sedangkan syarat cukup dalam pembentukan kawasan mata uang bersama adalah terpenuhinya keranjang mata uang dari kelompok Negara yang berserikat yang digunakan diantara mereka sendiri, seperti mata uang Euro. Sementara faktor-faktor yang menentukankeranjang basket mata uang diantaranya adalah ukuran ekonomi, konsolidasi fiskal yang dianut, serta kesamaan gejolak permintaan dan penawaran (structural shock) diantara Negara yang berserikat (Ramayandi, 2005; Park, 2009)

Table 3. Pemenuhan Kriteria Konvergen, Tahun 2006

Variabel	Bahrain	Kuwait	Oman	Qatar	Saudi Arabia	Uni Emirat Arab
Defisit Anggaran < 3% GDP, atau 5% bila harga minyak rendah	√	√	√	√	√	√
Rasio Hutang terhadap GDP < 60%	√	√	√	√	√	√
Cadangan devisa melebihi empat bulan impor	-	√	√	√	√	√
Suku bunga ≤ 2% diatas rata-rata Negara yang berserikat	√	√	√	√	√	√
Inflasi ≤ 2% diatas rata-rata Negara yang berserikat	√	√	√	-	√	-

Sumber: Khan, 2009

Informasi umum yang diperoleh dari media sesric menyebutkan bahwa cadangan emas percapita di tiga negara anggota OKI yaitu Kuwait, Lebanon, dan Libya lebih tinggi dari cadangan emas di negara-maju yang mencapai USD 683. Terutama untuk Lebanon, di era tahun 1960–1970 sebelum breton woods, Lebanon pernah menjadi pusat keuangan di timur tengah dan menjaminkan kekayaannya dalam cadangan emas selama masa perang, sehingga saat ini cadangan emas di Lebanon adalah yang tertinggi di dunia USD 2,375 perkapita. Sementara Saudi

Arabia, Qatar, Algeria dan Kazakstan memegang cadangan emas diatas rata dunia yang hanya USD 136.

Indikator lainnya yang paling umum digunakan untuk melihat divergen atau konvergen sebuah kelompok negara yang berserikat adalah dengan membandingkan antara pendapatan perkapita riil yang tumbuh lebih pesat daripada pertumbuhan ekonominya atau yang disebut absolut konvergen. Temuan SESRIC (2013) yang menyatakan adanya kecenderungan konvergen bersyarat diantara anggota OKI yang dikarenakan faktor modal sumberdaya manusia merupakan faktor penjas yang mengakibatkan adanya 50% variasi dari pendapatan perkapita dan tingkat

⁴ Di dunia ini terdapat lima kelompok Negara berserikat yang sudah mewujudkan monetary union, tiga union di afrika, satu di karibia, dan satu di Eropa

konvergenitasnya mencapai 0,5% pertahun. Sehingga, hasil riset ini merekomendasikan agar negara-negara anggota OKI terus meningkatkan investasinya pada sector pendidikan, termasuk didalamnya memberikan kesempatan yang luas bagi kaum wanita untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi.

Usulan lainnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota OKI adalah dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi asing maupun domestik sebagai agen pendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, seperti disinggung semula bahwa intensitas perdagangan intra-OKI sangat rendah yang menyebabkan tingkat konvergenitasnya relatif tinggi. Sehingga penguatan hubungan perdagangan intra OKI perlu ditingkatkan untuk mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Aspek lainnya yang dianggap penting untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengurangi kesenjangan antar negara anggota yang berserikat adalah dengan menekan laju pertumbuhan penduduk dan pengembangan kelembagaan baik di tingkat pemerintah lokal, nasional maupun regional menjadi lebih baik.

Kesamaan Gejolak Struktural

Untuk melihat gejolak permintaan dan penawaran yang mengindikasikan gejolak struktural di kawasanyang berserikat, maka penelitian ini

menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Ramayandi (2005). Beberapa tahapan uji untuk menentukan bahwa model yang menggambarkan tentang gejolak struktural sehingga layak digunakan uji Vector Autoregression adalah sebagai berikut:

1. Uji Deskripsi data

Dengan mengambil sample series dari tahun 1975 – 2011, yang berarti terdapat 36 tahun pengamatan untuk masing masing negara, sehingga total sample untuk menguji gejolak permintaan (logGDPriil) maupun gejolak penawaran atau inflasi (logGDPdeflator) berjumlah 222 pengamatan.

2. Uji Stationaritas

Masing-masing variabel kemudian diuji stationaritas. Dengan menggunakan uji Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk menguji unit root, diperoleh kesimpulan bahwa variabel GDP riil dan Deflator GDP belum stationer. Oleh karena itu dilakukan first differencing, yaitu mengurangi data dengan periode sebelumnya. Hasil uji difference menunjukkan bahwa bahwa data stationer sehingga dapat dilakukan uji unstructural VAR. Pemilihan lag optimum didasarkan pada perhitungan nilai AIC terendah, dan lag pertama memiliki nilai terendah, sehingga variabel ini yang digunakan untuk menghitung VAR.

Tabel 4. Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
Deflator	222	491.53	.00	491.53	71.5158	4.94543
GRiil	222	1.38E12	1.47E8	1.38E12	1.1062E11	1.40756E10
Valid N (listwise)	222					

Sumber: SPSS 17, pengolahan data, 2013

Tabel 5. Uji Stasioner

Variabel/Uji Statistik	Nilai statistik	Critical value	Keterangan
1. IRAQ · GDP Deflator · GDP Riil	-1.909 2.303	-3.600 -1.950	Belum stationer
2. IRAN · GDP Deflator · GDP Riil	4.457 2.875	-3.600 -1.950	Belum stationer
3. SAUDI ARABIA · GDP Deflator · GDP Riil	5.838 4.346	-3.600 -1.950	Belum stationer
4. UNI EMIRAT ARAB · GDP Deflator · GDP Riil	2.028 5.380	-3.600 -1.950	Belum stationer
5. QATAR · GDP Deflator · GDP Riil	1.987 10.071	-3.600 -1.950	Belum stationer
6. KUWAIT · GDP Deflator · GDP Riil	1.226 3.903	-3.600 -1.950	Belum stationer

Sumber: STATA 12 , pengolahan data, 2013

Gejolak Permintaan

Gejolak permintaan pada intinya adalah terdiri dari kebijakan makroekonomi yang murni dan komponen stokastik. Guncangan permintaan dasarnya menangkap kedua komponen guncangan kebijakan makro dan guncangan preferensi

publik dalam perilaku permintaan swasta. Hasil korelasi pearson menunjukkan bahwa guncangan permintaan *agregat* dari kelima negara kecuali Kuwait memiliki perilaku ekonomi yang tidak hanya cenderung berkorelasi tetapi juga berkembang bersama pada periode yang diamati.

Tabel 6. Uji Korelasi Pearson Estimasi VAR Gejolak Permintaan

		Correlations					
		DIFF (IRQ_1,1)	DIFF (IRN_1,1)	DIFF (SAU_1,1)	DIFF (UEA_1,1)	DIFF (QTR_1,1)	DIFF (KWT_1,1)
DIFF(IRQ_1,1)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	1					
	N	36	36	36	36	36	36
DIFF(IRN_1,1)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.791**	1				
DIFF(SAU_1,1)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.897**	.809**	1			
DIFF(UEA_1,1)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.868**	.735**	.934**	1		
DIFF(QTR_1,1)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	.924**	.868**	.967**	.896**	1	
DIFF(KWT_1,1)	Pearson Correlation Sig. (2-tailed)	-.581**	-.436**	-.512**	-.525**	-.597**	1

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: SPSS 17, pengolahan data, 2013

Gejolak Penawaran

Meskipun guncangan penawaran agregat diantara ke lima negara kawasan teluk menunjukkan magnitude yang lebih kecil dibandingkan guncangan permintaan agregat, tetap menunjukkan tingkat signifikansi korelasi positif yang

tinggi kecuali untuk Kuwait. Justifikasi untuk temuan ini adalah adanya overinvestasi dibalik tingginya pertumbuhan ekonomi di kawasan timur tengah yang berdampak pada perbedaan pola pertumbuhan ekonomi di masing-masing negara anggota.

Tabel 7. Uji Korelasi Pearson Estimasi VAR Gejolak Penawaran

		Correlations					
		DIFF (IRQ_1,1)	DIFF (IRN_1,1)	DIFF (SAU_1,1)	DIFF (UAE_1,1)	DIFF (QTR_1,1)	DIFF (KWT_1,1)
DIFF(IRQ_1,1)	Pearson Correlation	1					
	Sig. (2-tailed)						
	N	36	36	36	36	36	36
DIFF(IRN_1,1)	Pearson Correlation	.442**	1				
	Sig. (2-tailed)	.007					
DIFF(SAU_1,1)	Pearson Correlation	.668**	.445**	1			
	Sig. (2-tailed)	.000	.007				
DIFF(UAE_1,1)	Pearson Correlation	.701**	.492**	.911**	1		
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.000			
DIFF(QTR_1,1)	Pearson Correlation	.742**	.588**	.914**	.908**	1	
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		
DIFF(KWT_1,1)	Pearson Correlation	-.441**	-.307	-.462**	-.452**	-.548**	1
	Sig. (2-tailed)	.007	.068	.005	.006	.001	

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: SPSS 17, pengolahan data, 2013

KESIMPULAN

Secara umum dapat disimpulkan bahwa keenam negara yang berada dikawasan teluk dapat memulai untuk menjadi sebuah kawasan mata uang bersama dengan pengecualian negara Kuwait yang memiliki gejolak permintaan dan penawaran yang tidak searah dengan perubahan dan gejolak struktural yang terjadi di ke lima negara lainnya. Hal ini dapat terjadi dikarenakan faktor kebijakan makro ekonomi yang berbeda terutama dalam penentuan sistem rezim moneter yang digunakan. Tetapi, ini bukanlah satu-satunya alasan, perbedaan pola pertumbuhan, dan faktor stokastik dari data itu sendiri perlu menjadi perhatian.

Implikasinya bagi Indonesia dengan adanya kawasan mata uang bersama disebagian negara OKI, akan memberikan kemudahan akses pasar yang lebih luas dalam aktivitas perdagangan dengan negara yang berserikat, dan kemudahan dalam sisi regulasi yang diterapkan di negara-negara yang memiliki serikat moneter, sehingga

diharapkan keuntungan yang diperoleh Indonesia dengan adanya serikat moneter di negara-negara OKI dapat meningkatkan pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdmoulah, W. (2011) Arab Trade Integration: Evidence from Zero-Inflated Negative Binomial Model *Vol. 2. Journal of Economic Cooperation and Development* (pp. 39-66).
- Adom, A. D. (2012). Investigating the Impacts of Intraregional Trade and Aid on Per Capita Income in Africa: Case Study of the ECOWAS. *Economics Research International*.
- Aizenman, J., & Sengupta, R. (2012). *The financial trilemma in China and a Comparative Analysis with India*. Paper presented at the APEA Conference, Nanyang Technological University, Singapore.

- Al-Jarhi, M. A. Islamic Finance: An Efficient & Equitable Option *IRTI*. Jeddah, Saudi Arabia: IRTI.
- Cheewatrakoolpong, K., & Ariyasajakorn, D. (2012). *The Quantitative Assessment of Trade Facilitation Benefits in the ASEAN+6*. Paper presented at the APEA Conference, Nanyang Technological University, Singapore.
- Dridi, M. H. a. J. (2010) The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. *Vol. 10*. New York IMF.
- Duasa, J. (2010). Income Convergence or Income Divergence? A Study on Selected OIC Countries *Journal of Economic Cooperation and Development*, 31(4), 29-48.
- Ghani, G. M. (2011). The Impact of Trade Liberalisation on the Economic Performance of OIC Member Countries. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 32(1), 1-18.
- Gundogdu, A. S. (2011). Determinants of OIC Countries Customs Revenue vis-a-vis Implementation of WTO customs Valuation Agreement. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 3(32), 39-64.
- Gurler, O. (2000). Role and Function of Regional Blocs and Arrangements in the Formation of the Islamic Common Market. *Journal of Economic Cooperation*, 4(21), 1-28.
- Hakim, L., AboElsoud, M., & Dahalan, J. (2012, June, 2012). *The Pattern of Macroeconomics and Economic Integration: Evidence on D-8 Economic Cooperation*. Paper presented at the APEA Conference, Nanyang Technological University, Singapore.
- Hasan, M. K. (1998) An Empirical Investigation of Economic Cooperation Among the OIC Member Countries *ERF Working Paper: Vol. 0212*. Egypt: Commission of the European Communities.
- Huang, I.-C., & Chang, S.-H. (2012). *Trade and Economic Growth: Does the Financial System Matter?* Paper presented at the APEA Conference, Nanyang Technological University.
- Iqbal, M., Ali, S. S., & Mulyawan, D. (2007). *Advances in Islamic Economics and Finance*. Paper presented at the 6th International Conference on Islamic Economics and Finance, Jakarta, Indonesia.
- Ito, T. (2010). China as Number One: How about the Renminbi? *Asia Reshaping the Global Economic Order*, 5(2), 249-280.
- Kawasaki, K. (2012). *How does the regional monetary unit work as a surveillance tools?* Paper presented at the APEA conference, Nanyang Technological University, Singapore.
- Nicolas, F. (2012). *An updated analysis of intra-regional trade linkages in East Asia A post-crisis change of paradigm?* Paper presented at the APEA Conference, Nanyang Technological University.
- SESRIC. (2010) Annual Economic Report on the OIC Countries 2010. Ankara, Turkey.
- SESRIC. (2012) Exchange rate Regimes in the OIC Member Countries. Ankara, Turkey.
- SESRIC. (2013) Economic Growth and Convergence across the OIC Countries: An Econometric Framework. Ankara, Turkey.
- Tam, K. P. (2012). *A re-examination of Hong Kong and Singapore different exchange rate regimes in real exchange rate misalignment: Considering the impact of entreport trade*. Paper presented at the APEA Conference, Nanyang Technological University, Singapore.